

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* (GG) DAN
KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA
PEMERINTAH KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

FITRIA NINGSIH

57694 / 2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN
KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAH
KOTA PADANG

NAMA : FITRIA NINGSIH
BP/NIM : 2010/57694
KEAHLIAN : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Agustus 2013

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP: 19580519 199001 1 001

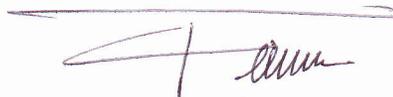
Pembimbing II



Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

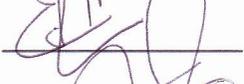
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi-Sektor Publik
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA PADANG

Nama : FITRIA NINGSIH
NIM/BP : 57694/2010
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, MSi, Ak	
2. Sekretaris	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	
3. Anggota	: Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	
4. Anggota	: Deviani, SE, M.Si, Ak	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Ningsih
NIM/Thn.Masuk : 57694/2010
Tempat/Tgl Lahir : Bukitinggi/23 November 1986
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Peumahan Lubuk Gading Permai Blok H No.3 Padang
No. Hp/Telpon : 085356916023
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan Tinggi.

Padang, Juli 2013

Yang menyatakan



NIM:10/57694

ABSTRAK

Fitria Ningsih (2010/57694) Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Kota Padang. Skripsi. Universitas Negeri Padang. 2013

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, MSi, Ak

Pembimbing II : Charoline Cheisviyanny, SE, M. Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) pengaruh penerapan *good governance* terhadap pelaksanaan otonomi daerah, dan 2) pengaruh kemampuan sumber daya manusia terhadap pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan Kota Padang.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah staf akuntansi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *simple random sampling*, dengan menggunakan rumus Slovin. Maka didapat responden sebanyak 63 orang responden. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS).

Kesimpulan penelitian menunjukkan: 1) penerapan *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,282 > 2,001$ ($sig\ 0,005 < \alpha\ 0,05$) yang berarti H_1 diterima, dan 2) kemampuan sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,408 > 2,001$ ($sig\ 0,001 > \alpha\ 0,05$) yang berarti H_2 diterima.

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi instansi pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai prinsip-prinsip *good governance* dan kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan otonomi daerah agar pelaksanaan otonomi daerah dapat dapat terlaksana dengan semakin baik. 2) untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap pelaksanaan otonomi daerah, dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan pergantian sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan membukakan mata hati dan fikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pengaruh Penerapan *Good Governance* (GG) dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Kota Padang.** Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, MSi, Ak selaku pembimbing I, dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M. Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Ayah dan ibu, Kakak beserta Adik-adik dan seluruh Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan do'a, perhatian, dan kasih sayang serta pengorbanan dan bantuan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi angkatan 2010 yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan saran maupun kritik dari pembaca guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	12
A. Kajian Teori	12
1. Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	12
a. Pengertian Otonomi Daerah	12
b. Azas-azas Dalam Otonomi Daerah	12

c. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah.....	14
d. Impilikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15
e. Pelaksnaan Otonomi Daerah	17
f. Kenadala Pelaksanaan Otonomi Daerah	19
g. Faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi daerah..	20
2. <i>Good Governance</i>	21
a. Pengertian <i>Good Governance</i>	22
b. Karakteristik Good Governance	24
3. Sumber Daya Manusia	31
a. Pengertian Sumber Daya Manusia	31
b. Manajemen Sumber Daya Manusia	34
B. Penelitian Relevan	37
C. Kerangka Konseptual	38
D. Hipotesis Penelitian	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Populasi Dan Sampel	42
C. Jenis Dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Variabel Penelitian	46
F. Pengukuran Variabel	47
G. Instrumen Penelitian	48

H. Uji Validitas Dan Reliabilitas	50
I. Uji Asumsi Klasik	52
J. Teknik Analisis Data	53
K. Definisi Operasional	58
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Sampel Dan Responden Penelitian	61
B. Analisis Deskriptif	62
C. Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas	71
D. Hasil Uji Asumsi Klasik	73
E. Hasil Analisis regresi Berganda	76
F. Uji Model	78
G. Uji Hipotesis.....	81
H. Pembahasan	82
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Keterbatasan	89
C. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Padang	43
2. Daftar Skor Jawaban Pernyataan Berdasarkan Sifat	47
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	49
4. Nilai Cronbach's Alpha & Corrected Item Total Correlation	55
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	61
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	63
8. Statistik Deskriptif	64
9. Distribusi Frekuensi Variabel Penerapan Good Governance	66
10. Distribusi Frekuensi Variabel Kemampuan Sumber Daya Manusi	68
11. Distribusi Frekuensi Variabel Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	69
12. Nilai Cronbach's Alpha Penelitian	71
13. Nilai Corrected Item Total Correlation Penelitian.....	72
14. Uji Normalitas	74
15. Uji Multikolinearitas	75
16. Uji Heteroskedastisitas	76
17. Koefisien Regresi	77
18. Uji F Hitung	79
19. Uji Koefisien Determinasi	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	94
2. Hasil Analisis Validitas dan Realibilitas Penelitian	99
3. Statistik Deskriptif	104
4. Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas	104
5. Uji Hipotesis	109
6. Surat Izin Penelitian	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Dengan demikian daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengelola daerahnya secara bertanggung jawab. Dalam arti bahwa berbagai program yang dijalankan atau dilaksanakan daerah diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami defisit fiskal.

Pada sisi lain berjalannya otonomi daerah seluas-luasnya bagi daerah dalam membiayai daerah, memberikan peluang untuk menggali potensi daerah melalui pemungutan pajak dan restribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah kedalam penetapan kebijakan perda. Pelaksanaan otonomi daerah berarti implementasi dan penerapan kewenangan oleh pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Terdapat beberapa indicator dalam mengukur pelaksanaan otonomi yaitu dengan meninjau aspek

kewenangan pemerintah daerah dengan DPRD, Pengawasan, dan pembinaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, masalah birokrasi, desentralisasi fiscal dan pelayanan publik (Bastian:2006). Dari beberapa indikator ini akan tergambar sejauhmana pelaksanaan otonomi daerah sudah terealisasi di daerah. Diharapkan otonomi, semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintah dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah yang dimilikinya.

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah di harapkan masing-masing daerah mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh pemkab/pemkot. Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

UU No.22 1999 tentang pemerintahan daerah, secara jelas juga menyatakan bahwa terjadinya peningkatan PAD di daerah merupakan indikasi tercapainya tujuan pelaksanaan otonomi di daerah, karena dalam daerah Kabupaten/Kota tidak ada lagi wilayah administrative tetapi pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh, Era otonomi daerah yang secara resmi dimulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001

menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan lain yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan.

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/ kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, kemampuan itu tercermin dari jumlah pendapatan asli daerahnya.

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah merupakan desentralisasi sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi daerah haruslah didasarkan kepada faktor-faktor yang dapat menjamin daerah yang bersangkutan mampu mengurus rumah tangganya. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah merupakan desentralisasi sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi kepada daerah haruslah didasarkan kepada faktor-faktor yang dapat menjamin daerah yang bersangkutan mampu mengurus rumah tangganya.

Adapun fenomena yang terkait dengan otonomi daerah di Kota Padang adalah masih sangat kecilnya Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, Jika dilihat dari jumlah Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota

Padang, terlihat Belanja Kota Padang sangat besar dibandingkan dengan jumlah pendapatan asli daerah yang diterima Kota Padang yang terlihat dari tahun 2008 sampai 2011 yaitu ;

Tabel 1:
Pendapatan dan Belanja Kota Padang (Dalam jutaan Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Belanja Daerah (Rp)
2008	117.728,89	887.727,53
2009	133.318,41	996.768,31
2010	116.691,28	1.100.368,16
2011	149.874,800	1.180.346,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang

Dari data diatas terlihat bahwa ketergantungan Kota Padang masih sangat besar terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, ini terlihat dari masih kecilnya Pendapatan Asli Daerah Kota Padang jika dibandingkan dengan Belanja Daerah Kota Padang. Ini menunjukkan masih sangat besarnya ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dan belum optimalnya pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah.

Jika dilihat dari Pendapatan Asli Kota Padang dan Dana Perimbangan yang diterima Kota Padang juga terlihat bahwa masih kecilnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima Kota Padang ini terlihat dari tahun 2008 sampai 2011 :

Tabel 2:
Pendapatan Kota Padang (Dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Pendapatan Asli daerah		Dana Perimbangan	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2008	887.799,45	117.728,89	13,26	754.710,66	85,04
2009	909.254,42	133.318,41	12,47	732.818,46	80,60
2010	1.040.019,73	116.691,28	11,22	741.044,46	71,25
2011	1.236.072,23	149.874,800	12,13	828.149,46	67

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang

Pada tahun 2011 kontribusi PAD kota padang terhadap total pendapatan hanya sebesar 12,13% (Sumber data: BPS Kota Padang). Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting dimana Pendapatan Asli Daerah akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Yunus (2010: 23) “Terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari World Bank Glynn Cochrane berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20% maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri”.

Berdasarkan teori tentang kemandirian keuangan daerah, menunjukkan bahwa Kota Padang tidak dapat memperkuat kemandirian keuangan daerah, karena pendapatan asli daerah masih rendah. Perolehan PAD yang masih kecil memperlihatkan daerah belum dapat melaksanakan kemandirian keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokratis dengan memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan

pengaturan, pembagian, penggalan dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan serta pengaturan perimbangan keuangan daerah, untuk dapat melaksanakan semua itu diperlukan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Kemampuan Sumber Daya Manusia dari Aparatur Pemerintah, sehingga pelaksanaan otonomi daerah yang tidak hanya berfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja. Lebih penting dari itu adalah bagaimana kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah dapat terwujud.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik. Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya.

Secara konseptual pengertian *good governance* (baik) dalam istilah *good governance* (kepemerintahan yang baik), mengandung dua pemahaman, pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Kemampuan Sumber Daya Manusia dan kemampuan keuangan/ekonomi, merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan otonomi

daerah. Pentingnya posisi sumber daya manusia pelaksana ini karena merupakan unsur dinamis dalam pemerintahan yang bertindak sebagai penggerak roda organisasi pemerintah, untuk itu perlunya aparatur yang kompeten dan berkualitas.

Sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting yang harus dilihat dalam sebuah instansi. Untuk meningkatkan SDM maka harus diadakan pembinaan. Pembinaan sumber daya manusia bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang disiplin, professional, berkualitas tinggi, prouktif untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien.

Dalam mengsucceskan pembangunan dibutuhkan aparatur yang berpengetahuan tinggi, keterampilan tinggi, dan kemauan tinggi, dalam menjalankan tugas-tuganya untuk meningkatkan pelayanan publik maupun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan daerah. (Josep:2006). Berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah sebagian besar bergantung pada Pemerintahan Daerah itu sendiri yang didukung oleh Aparatur atau alat-alat perlengkapan Daerah lainnya yaitu Para Pegawai/Apartur Daerah itu sendiri.

Penyelenggaraan otonomi Daerah yang sehat dapat diwujudkan pertama-tama dan terutama oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksananya (Aparatur Pemerintah). Penyelenggaraan otonomi Daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik, dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya.

Pentingnya posisi manusia pelaksana ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak sebagai penggerak roda organisasi pemerintahan.

Kemampuan Keuangan/Ekonomi, juga merupakan indikator yang tidak kalah penting. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan daerah jelas tidak mungkin dapat ditingkatkan. Sementara itu dengan pendapatan yang memadai, kemampuan daerah untuk menyelenggarakan otonomi akan meningkat. Dengan Aparatur Pemerintah yang berkualitas, daerah akan mampu untuk membuka peluang-peluang potensi ekonomi yang terdapat pada daerah tersebut. Pengembangan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, apabila dikelola dengan secara optimal dapat menunjang pembangunan daerah dan mewujudkan otonomi. Kemampuan daerah untuk membiayai diri sendiri akan terus meningkat.

Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui dari seberapa besar kemampuan dari pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat daerah. Usaha penciptaan kemandirian daerah sebagai tujuan dari otonomi daerah, dapat dilakukan dengan cara beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik. Selain itu perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Gambaran dari kemampuan keuangan pemerintahan daerah yang semakin kuat, ditentukan dari seberapa besar penerimaan pemerintahan daerah yang

bersumber dari daerah itu sendiri. Bantuan dari pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi perlu untuk diminimalkan, untuk mewujudkan kemandirian daerah otonomi.

Adapun penelitian mengenai Pengaruh *Good Governance* dan Kemampuan Sumber Daya Manusia diantaranya penelitian yang dilakukan Vebri (2009) menguji tentang Pengaruh Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah. Penelitian dilakukan pada pemerintah Daerah Kabupaten Nias. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh *good governance* dan kemampuan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan penjelasan dan data diatas oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemerintahan yang baik dan sumber daya manusia di Kota Padang yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *Good Governance (GG)* dan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Padang.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas masalah yang dapat diidentifikasi adalah ;

1. Sejauhmana Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Padang?
2. Sejauhmana Penerapan *Good Governance* pada Pemerintah Kota Padang?
3. Sejauhmana Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah?

4. Sejuahmana Pengaruh Kemampuan Keuangan Kota Padang dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah?
5. Sejuahmana Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Pelaksanaan Otonomi Dearah Dikota Padang?
6. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam Penerapan *Good Governance* dan Sumber Daya Manusia?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu Pengaruh Penerapan *Good Governance (GG)* dan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Pelaksanaan otonomi Daerah Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejuahmana Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Padang?
2. Sejuahmana Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Padang?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi bukti empiris tentang:

1. Pengaruh penerapan *Good Governance* (GG) terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Kota Padang.
2. Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan akuntansi di pemerintahan.
- b. Bagi Akademik, sebagai khasanah penelitian terutama di bidang sektor publik, dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa di lingkungan Akademika.
- c. Bagi Sektor Publik, dapat dijadikan sebagai masukan untuk mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan di sektor publik.

BAB II

KEJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teoritis

1. Pelaksanaan Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Bastian (2006:338) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan pengertian di atas, otonomi daerah secara lebih luas lagi merupakan wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah untuk mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari bidang ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. Namun kewenangan dalam era otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu seperti: politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama karena bidang-bidang tersebut menjadi urusan pemerintah pusat.

b. Asas-Asas Dalam Otonomi Daerah

Bastian (2006:338) menyatakan bahwa terdapat beberapa asas penting dalam UU otonomi daerah yaitu:

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
4. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah otonomi daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tatacara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Asas-asas di atas menjadi dasar dan landasan dalam pelaksanaan otonomi daerah karena telah mencakup berbagai ketentuan dalam pemberlakuan sistem otonomi daerah di Indonesia.

c. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas dan bertanggungjawab.
3. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota, sedang otonomi daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian dan pendapatan daerah otonomi karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administratif.

6. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibangun oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan daerah otonomi.
7. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Pelaksanaan asas desentralisasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.
9. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan.

Penerapan prinsip-prinsip otonomi daerah menjadi hal yang sangat mendesak karena di dalamnya terdapat berbagai kaidah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

d. Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, kemampuan itu tercermin dari jumlah pendapatan asli daerahnya.

Sejak era otonomi daerah telah banyak terjadi perubahan yang sangat fundamental di dalam pola pengaturan hubungan antara pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan otonomi daerah mempengaruhi kewenangan pemerintahan daerah dalam beberapa hal sebagai berikut: (Joko Tri Haryanto, www.google.com).

1. Pemerintah daerah diberi hak dan kewenangan dalam mengurus bidang pemerintahan secara lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung

jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

2. Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas maka sumber-sumber keuangan telah banyak bergeser ke daerah baik melalui perluasan basis pajak (*taxing power*) maupun dana perimbangan.

Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan:

1. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah pendapatan asli daerah yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap mendasarkan pada batas kewajaran.
2. Didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

e. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Aspek-aspek Pelaksanaan otonomi daerah menurut Bastian (206:350) adalah:

1. Aspek kewenangan

Dari otonomi daerah terjadi penerapan *local democracy model* yang menghormati nilai-nilai demokrasi dan kemajemukan masyarakat, pola hubungan kekuasaan antardaerah otonom tidaklah bersifat hirarkis, penyelenggaraan otonomi oleh pemerintah setempat yang mempresentasikan aspirasi dan kepentingan local serta penerapan *good governance*.

2. Dinamika hubungan antara Kepala Daerah dengan DPRD

Hubungan antara Kepala Daerah dengan DPRD di era otonomi daerah bersifat pengawasan dan ada stabilitas politik, sementara di era orde baru militer menjadi bagian dominan dari struktur kekuasaan.

3. Aspek pengawasan dan pembinaan

Pembinaan dalam konteks otonomi daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

4. Birokrasi era otonomi daerah

Keberhasilan sebuah pemerintahan di era otonomi daerah ditentukan oleh efektivitas mesin birokrasi. Birokrasi berfungsi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

5. Desentralisasi fiskal dan pelayanan publik

Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antardaerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Nyakman dan Rasyid (dalam Widjaja, 1992 : 107) mengemukakan lima variabel yang menjadi tolok ukur kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, yaitu:

1. Kemampuan keuangan daerah, nilainya ditentukan oleh besarnya peranan dan peningkatan pendapatan asli daerah terhadap jumlah total pembiayaan daerah.
2. Kemampuan aparatur daerah yang tercermin pada rasio jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk, masa kerja pegawai, golongan kepegawaian, pendidikan formal dan pendidikan fungsional aparat.
3. Partisipasi masyarakat yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, kesehatan, dan pelayanan sosial.
4. Variabel ekonomi di daerah dengan menggunakan indikator seperti : nilai rata-rata pendapatan perkapita dalam lima tahun terakhir.
5. Variabel demografi yang indikatornya adalah kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk buta aksara dan lainnya.

f. Kendala Pelaksanaan Otonomi Daerah

Beberapa kendala utama pelaksanaan otonomi daerah, Bastian (2006:343):

1. Belum memadai dan belum mantapnya kelembagaan di daerah, sehingga cenderung menghambat pelaksanaan otonomi daerah.
2. Masih terbatasnya ketersediaan dana pembangunan, sementara tuntutan untuk mempercepat pembangunan semakin gencar.
3. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar di daerah.
4. Tidak meratanya ketersediaan sumber daya alam di daerah.
5. Kurang dan tidak meratanya SDM yang berkualitas, sehingga tidak adanya kreativitas.
6. Kendala alamiah, yaitu sumber daya alam daerah yang tidak sama.
7. Kendala institusional.
8. Kendala investasi (modal).
9. Kendala sumber keuangan daerah dalam APBD.

g. Fakto-fakta yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah

Menurut Josep (2005:66) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah :

1. Manusia pelaksananya harus baik

Manusia pelaksananya harus baik adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya faktor ini, karena manusia merupakan subjek dalam aktivitas pemerintahan.

2. Keuangan harus cukup baik

Keuangan yang baik mengandung arti setiap hak yang berhubungan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

3. Peralatannya harus cukup dan baik

Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah.

4. Organisasi dan Manajemennya harus baik

Organisasi yang dimaksud adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain, dalam rang mencapai sesuatu tujuan tertentu.

Cara bagaimana mencapai tujuan pemerintah daerah ditentukan oleh manajemen pemerintahan daerah. Agar otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan organisasi dan manajemen pemerintah yang baik.

2. *Good Governance*

Secara umum *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Tetapi meskipun istilah *good governance*

sering disebut dalam berbagai kesempatan, istilah tersebut dimaknai secara berlainan. Satu sisi ada yang memaknai *good governance* sebagai kinerja suatu pemerintahan, perusahaan atau organisasi masyarakat. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik maka diperlukan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan terhadap tata kelola keuangan pemerintah.

a. Pengertian *Good Governance*

Menurut Salam (2004:225) menyatakan:

”*governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses, dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka, serta menggunakan hak dan kewajiban mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga publik mengatasi masalah-masalah publik, mengelolakan sumber daya publik dan menjamin realisasi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, *good governance* memiliki hakekat yang esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum”.

Dalam Mardiasmo (2002:17) *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *United National Development Program (UNDP)* memberikan pengertian *good governance* sebagai berikut “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum,

memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *UNDP* lebih menekankan aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengolaan urusan-urusan negara pada semua tingkat. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Merujuk pada konsepsi tersebut, *good governance* memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Di atas semua itu, atribut utama *good governance* adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam penyelesaian berbagai persoalan publik.

Sementara itu *World Bank* Dalam Mardiasmo (2002:18) memberikan defenisi *good governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. *World Bank* mendefinisikan *good governance* adalah:

“sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha”.

Dalam hal ini *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah, mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Jika mengacu pada program *World Bank* dan *UNDP*, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Kata baik di sini maksudnya mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan karakteristik dasar *good governance*.

b. Karakteristik *Good Governance*

Dalam wacana *good governance*, tidak sedikit pihak yang mempertukarkan antara prinsip, unsur, elemen, dimensi, indikator, dan karakteristik tetapi maknanya merujuk pada hal yang sama. Istilah *good governance* diawali oleh tawaran badan-badan internasional, namun cita *good governance* pada saat ini sudah menjadi bagian serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan ke depan.

Menurut Salam (2004:226) “*governance* merupakan seni kepemimpinan publik. Ada tiga dimensi *governance*, yaitu: (1) Bentuk rezim

politik, (2) Proses di mana otorisasi digunakan dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya sebuah negara, (3) Kapasitas pemerintah untuk merancang, memformulasikan, dan mengimplementasikan kebijakan dan fungsi-fungsi pelaksanaan”.

Berdasarkan tiga dimensi di atas, ada empat kriteria yang membentuk *good governance*, yaitu: (1) legitimasi pemerintah (tingkat demokrasi), (2) akuntabilitas politik dan unsur-unsur pemerintah resmi (kebebasan media, transparansi pengambilan keputusan mekanisme, akuntabilitas), (3) kompetensi pemerintah untuk memformulasikan kebijakan dan pemberian pelayanan, (4) respek kepada hak asasi manusia dan aturan hukum (hak-hak dan keamanan individual dan kelompok, kerangka kerja kegiatan ekonomi dan sosial, partisipasi).

Menurut *UNDP* dalam Mardiasmo (2002:18) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*)

Setiap orang atau setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berasosiasi dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

- a. Supermasi hukum: di samping erat kaitannya dengan *rule of law* juga mengisyaratkan adanya jaminan bahwa suatu masalah diatur secara jelas, tegas dan tidak duplikatif, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Hukum yang responsif: hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dan bukan dibuat untuk kepentingan segelintir elit.
- c. Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif: upaya yang mempersyaratkan adanya sanksi, mekanisme untuk menjalankan sanksi, serta sumber daya manusia/ penegak hukum yang memiliki integritas.
- d. Independensi peradilan: yakni prinsip yang meletakkan efektifitas peradilan sebagai syarat penting perwujudan *rule of law*.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi baru harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat *monitoring* dan evaluasi.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

- a. Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat.
- b. Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan pengaduan.
- c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- d. Tumbuhnya kesadaran masyarakat.
- e. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengaduan.

5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Dalam hubungan yang saling melengkapi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, pemerintah bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Berkeadilan (*Equity*)

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya serta memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

- a. Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
 - b. Adanya perbaikan yang berkelanjutan.
 - c. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.
 - d. Meningkatkan kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat.
 - e. Berkurangnya penyimpangan pembelanjaan.
 - f. Berkurangnya biaya operasional pelayanan.
 - g. Prospek memperoleh standar ISO pelayanan.
8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, bergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau external. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

9. Bervisi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan manusia (*human development*), bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

UNDP menjelaskan tata pemerintahan yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan semua.
2. Transparan dan bertanggungjawab.
3. Efektif dan adil pada masyarakat.
4. Menjamin adanya suplemasi hukum.
5. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada *consensus* masyarakat.
6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan *good governance* di daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonom, Miyasto mengemukakan beberapa syarat:

1. Demokrasi dan desentralisasi. Sistem yang demokratis adalah syarat mutlak dari terselenggaranya *good governance*. Demokrasi berarti ada desentralisasi kekuasaan pada para stake holder.
2. Pranata hukum. Demokrasi saja tidak cukup untuk menjamin terwujudnya *good governance*, diperlukan dukungan para pranata hukum yang memadai yang dijunjung tinggi oleh setiap orang, dan yang adil dan mampu menjamin bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum.
3. Transparansi. Ini hanya akan terjadi jika masyarakat dapat dengan secara mudah mengakses semua informasi yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah, pembanguna maupun kegiatan lainnya.
4. Akuntabel. Setiap penyelenggaraan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tidak hanya dibidang keuangan, tetapi juga dibidang-bidang lain.
5. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan muncul bila mereka merasakan manfaat dari suatu kebijakan dan merasa terlibat di dalam pengambilan keputusannya.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, jelas bahwa *good governance* mempunyai tujuan yang lebih efisien dan penggunaan

resources yang ekonomis. *Good governance* adalah strategi untuk menciptakan institusi masyarakat yang kuat, dan juga untuk membuat pemerintah/publik. semakin terbuka, responsif, akuntabel dan demokratis. Akan tetapi konsep *good governance* jika dikembangkan akan menciptakan *modern governance* (baik *good 'national' governance* maupun *good local governance*) yang handal yang tidak hanya menekankan aktivitasnya dalam kerangka efisiensi tetapi juga akuntabilitasnya dimata publik.

3. Sumber Daya Manusia

Secara umum Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi, sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Manusia pelaksana dalam pemerintahan harus baik, ini merupakan faktor esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pentingnya faktor ini karena manusia merupakan subjek dalam setiap aktivitas pemerintahan.

a. Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Keberadaan Sumber Daya Manusia yang tepat secara kuantitas, sangat dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sebagaimana

dinyatakan oleh Joseph Riwukaho (1988), sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi otonomi daerah.

Dalam wacana tentang desentralisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi sumber daya manusia personalis faktor determinan yang harus tersedia dan melekat dalam pelaksanaan pemerintahan terlaksananya otonomi daerah.

Pergeseran paradigma dan konsep kecakapan menjadi kompetensi telah menimbulkan strategi yang sangat positif bagi upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Covey, Roger dan Rebecca Merrill (1994) dalam Sedarmayanti (2004:61) menyatakan bahwa kompetensi mencakup hal sebagai berikut :

1. Kompetensi teknis : pengetahuan dan keahlian untuk mencapai hasil yang telah disepakati, kemampuan untuk memikirkan persoalan dan mencari alternative baru.
2. Kompetensi konseptual : kemampuan melihat gambar besar, untuk menguji berbagai pengandaian dan mengubah perspektif.
3. Kompetensi untuk melihat ketergantungan : kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain, termasuk kemampuan berkomunikasi, mendapat alternative lain,

kemampuan untuk melihat untuk melihat dan beroperasi secara efektif secara organisasi.

Menurut Susilo (2002:3) “Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya”. Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang dibutuhkan organisasi/ perusahaan. Namun pelaksanaannya, kebijakan manajemen masih banyak yang belum memperhatikan peran sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini dua hal yang diperhatikan dalam sumber daya manusia, yaitu :

a. Persaingan dalam sumber daya manusia

Adalah persaingan dalam kualitas sumber daya manusia dari setiap organisasi, baik dalam bentuk perusahaan ataupun lainnya. Kualitas sumber daya manusia ini diukur dari kemampuan pengetahuannya. Pengetahuan disini dimaksud dalam arti luas yaitu kemampuan SDM yang tercermin dari kinerjanya dan terlihat dari prilakunya yang kompeten, cepat dan inovatif serta dorongan yang kuat untuk belajar.

Nilai-nilai dalam sumber daya manusia adalah jumlah dari sumber daya manusia pada sebuah organisasi dan dapat juga disebut sebagai model intelektual dari orang-orang dalam organisasi, kemampuan yang mereka miliki, dan

menggunkannya dalam pekerjaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam peningkatan sumber daya manusia adalah dengan menggunakan semua bakat yang dimiliki sumber daya manusia yang ada dalam organisasi dan mengambil yang terbaik dari populasi bervariasi diluar organisasi mereka.

b. Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Stoner (2002:20) “manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan jabatan yang yang tepat pada saat organisasi memerlukannya”. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah menetapkan kebijakan organisasi untuk dapat meningkatkan kontribusi atau peranan lain. Adapun proses manajemen sumber daya manusia antara lain :

Perencanaan sumber daya manusia,

- 1) Sosialisasi atau orientasinya,
- 2) Pelatihan dan pengembangan,
- 3) Sosialisai atau orientasinya,
- 4) pelatihan dan pengembangan,
- 5) Penilaian prestasi.

c. Manusia Pelaksana

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah sebagai besar tergantung manusia pelaksana/sumber daya manusia, sumber daya manusia pelaksana pada pemerintahan daerah itu sendiri yang terdiri atas:

1. Kepala daerah

Berhasil tidaknya suatu daerah tergantung kepada kepala daerah dan kemampuan pribadi yang dimiliki oleh kepala daerah yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya yaitu:

- a. Menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintah daerah;
- b. Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan;
- c. Bersama-sama dengan DPRD membuat anggaran Penadaan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1974, Dewan Perwakilan rakyat Daerah adalah salah satu alat daerah di samping kepala daerah. DPRD, mempunyai fungsi :

- a. Sebagai patner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan Dearah; dan

d. Sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan Daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah.

4. Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Suatu daerah disebut daerah otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut:

- a. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah; urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah;
- b. Urusan rumah tangga daerah ini diatur dan diurus/diselenggarakan atas inisiatif/prakarsa dan kebijakan daerah itu sendiri;
- c. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, yang namun utunk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya;
- d. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerahnya.

4. Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terjadi pada empat jenjang yaitu:

- a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan;
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan;
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil;
- d. Partisipasi dalam evaluasi.

B. Penelitian Relevan

Dalam penelitian relevan ini penulis belum banyak memasukkan hasil yang masih terkait dengan penelitian yang menghubungkan antara *good governance* dan kemampuan sumber daya manusia, dikarenakan adanya keterbatasan dari sumber dan referensi. Namun diantaranya dapat digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Vebri (2009) melakukan penelitian Pengaruh Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah, penelitian ini dilakukan pada daerah Kabupaten Nias. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kemampuan aparatur pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang positif dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Aswin (2010) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan keuangan kota Salatiga dalam mendukung pelaksanaan

otonomi daerah, hasil penelitian ini membuktikan terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kemampuan keuangan terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Voni (2010) pengaruh pelaksanaan otonomi daerah dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota padang, dalam penelitian ini pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli kota padang.

Yulianda (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh *good govermanace* dalam pengelolaan keuangan daerah dan komitmen aparat terhadap kinerja pemerintah daerah, dari hasil penelitian yang dilakukan yulianda pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap komitmen aparat kinerja pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa *good governance* dan sumber daya manusia berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mendukung

terlaksananya otonomi daerah , penerapan *good governance* haruslah baik, dan sumber daya manusia yang memadai di pemerintah Kota Padang.

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah merupakan desentralisasi sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi kepada daerah haruslah didasarkan kepada faktor-faktor yang dapat menjamin daerah yang bersangkutan mampu mengurus rumah tangganya. Diantara faktor-faktor tersebut yang mendukung terselenggaranya otonomi daerah diantaranya adalah kemampuan sumber daya manusia yang ada, serta kerersediaan sumber daya alam dan peluang ekonomi daerah tersebut.

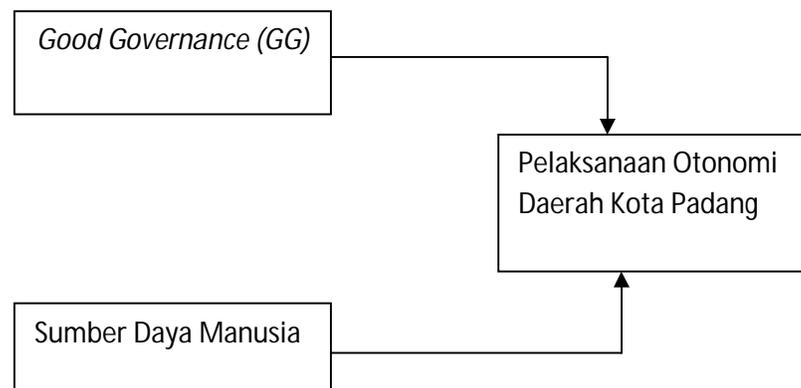
Dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan dukungan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga dapat tercapainya pelaksanaan otonomi dalam rangka kemandirian yang ditunjukkan oleh pendapatan asli daerah yang dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah berkaitan dengan desentralisasi dan otonom sistem yang demokratis adalah syarat mutlak terlaksananya *good governance*, desentralisasi kebijakan dalam rangka *good governance* merupakan suatu keharusan dalam menjalankan pemerintahan. Jika dikaitkan dengan penerapan *good governace* dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka semakin baik penerapan *good governave* dalam pemerintahan maka semakin baik pula pelaksanaan otonomi daerah yang didukung oleh aparatur

pemda yang berkualitas, dengan menempatkan orang-orang yang tepat dalam pemerintahan daerah, maka good governance akan terwujud.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan pertama-tama dan terutama ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksananya. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusianya pelaksananya baik, dalam arti mental maupun kapasitasnya. Pentingnya manusia pelaksana ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak/berfungsi sebagai subjek penggerak roda organisasi pemerintahan. Oleh sebab itu, kualifikasi mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



Gambar 1: Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual, dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penerapan *Good Governance* (GG) berpengaruh signifikan positif terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Padang.

H₂ : Kemampuan Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Padang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:

1. penerapan *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah pada Pemerintah Kota Padang. Dimana semakin baik penerapan *good governance* semakin baik pula pelaksanaan otonomi daerah (H_1) diterima.
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah Kota Padang. Dimana semakin baik kemampuan sumber daya manusia maka semakin baik pula pelaksanaan otonomi daerah (H_2 diterima).

B. Keterbatasan

meskipun peneliti telah merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kuesioner dalam penelitian ini dikembangkan sendiri tanpa merujuk pada kuesioner penelitian terdahulu, sehingga akan berpengaruh tingkat keterungkapan masalah penelitian.

2. Penelitian ini merupakan metode survey mengutamakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

C. Saran

berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penelitian menyatakan bahwa :

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa penerapan *good governance* dan kemampuan sumber daya manusia telah dilakukan dengan baik, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada pelaksanaan otonomi daerah yang belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengajian ulang mengenai prinsip-prinsip *good governance* dan kemampuan sumber daya manusia agar pelaksanaan otonomi dapat terlaksana dengan baik.
2. Penelitian ini masih terbatas pada penerapan *good governance* dan kemampuan sumber daya manusia terhadap pelaksanaan otonomi daerah, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang dihadapi pemerintah.

3. Pemerintah daerah selaku penyelenggara daerah harus mampu melaksanakan otonomi dan mengelola rumah tangga daerah secara baik. Pemerintah dapat menjadikan otonomi daerah sebagai momentum dalam memajukan daerah, mengelola kekayaan daerah, lebih giat mengkaji dan menggali berbagai potensi perpajakan daerah yang ada untuk dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan dan tentu saja meningkatkan pendapatan asli daerah agar daerah dapat lebih mandiri dalam pembiayaan program pembangunan daerah.
4. peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan perluasan sampel penelitian atau peneliti dapat mengadakan penelitian diluar Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yani. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Josep Riwo Kaho, 1991, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Rajawali Press. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mudrajat Kuncoro. 2004. *Otonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Modul *Good Governance.2006.*” Akuntabilitas dan Good Governance”. Jakarta. Melalui (www.google.com)(30/2/2013)
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- _____. 2004. *Otonomi Daerah Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miyasto, *Desentralisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance, dalam Pemulihan Ekonomi dan Otonomi Daerah*, LASPI, Jakarta, 2001.
- Raskiano, Aswin. 2010. Kemampuan keuangan daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Melalui (www.kabarindonesia.com) [30/01/2013]
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

- Susanto , voni 2010. Pengaruh pelaksanaan otonomi daerah dan optimalisasi pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli kota padang. Studi empiris pada SKPD Kota Padang. . *Skripsi*. Padang. FE UNP
- Ujang, Bahar. 2009. *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri*. Jakarta: PT. Indeks.
- Undang-Undang RI No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 Dan Juklak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yuliandra , Betri. 2012. Pengaruh penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah dan komitmen aparat terhadap kinerja pemerintah daerah. Studi empiris pada SKPD Kota Padang. . *Skripsi*. Padang. FE UNP